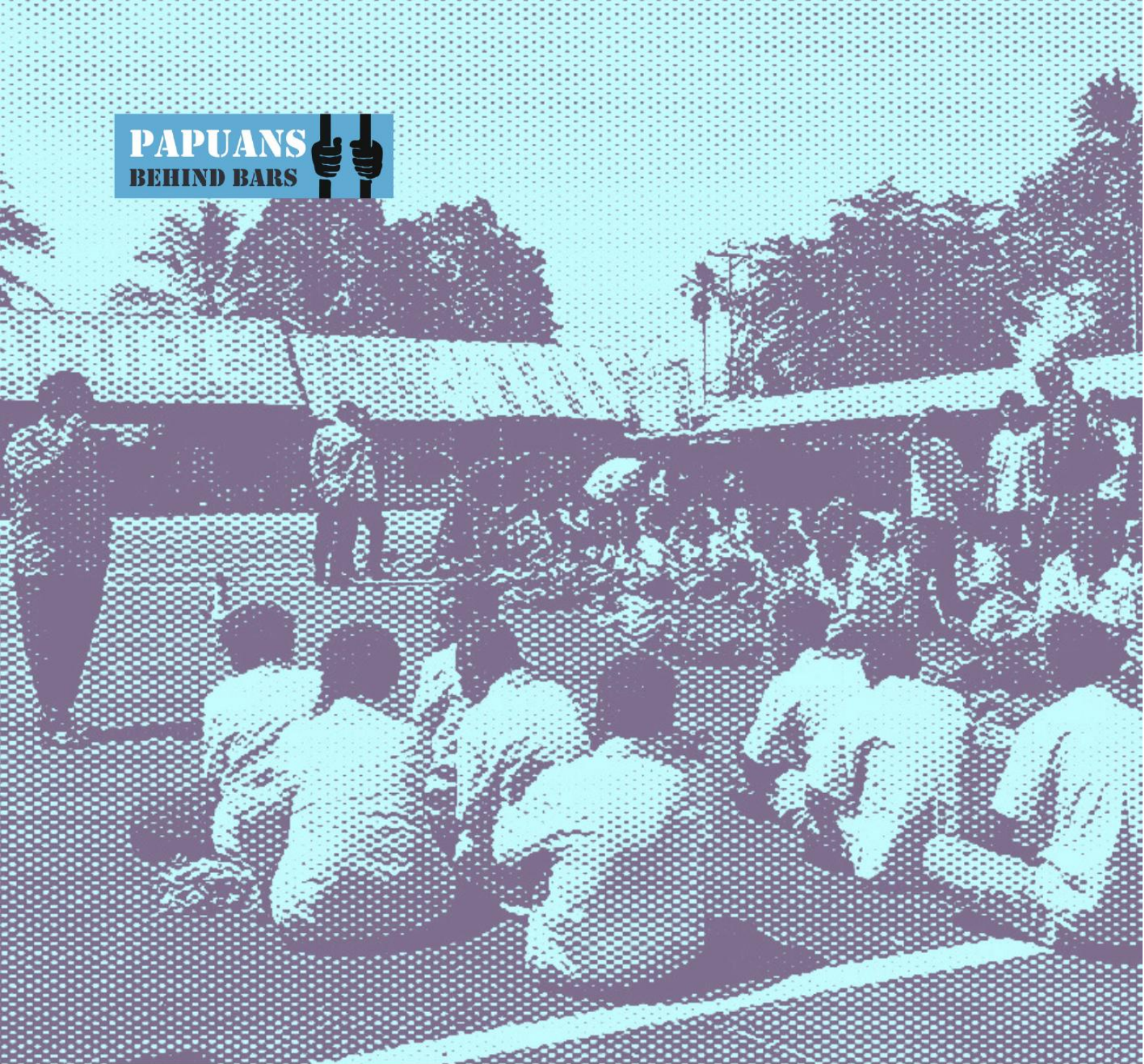


PAPUANS
BEHIND BARS



Papuans Behind Bars

LAPORAN

TRIWULAN

Januari–Maret 2025

Diterbitkan pertama kali pada 2025
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Puluhan pelajar dikumpulkan di lapangan Polres Nabire, Kabupaten Nabire, Prov. Papua Tengah,
setelah demonstrasi mereka yang menolak program Makan Bergizi Gratis dibubarkan, 17 Februari 2025.
Foto: Jubi/Hengky Yeimo

Papuans Behind Bars

Laporan Triwulan

Januari–Maret 2025

Ringkasan

Selama kuartal pertama tahun 2025, Papuans Behind Bars mencatat setidaknya 75 kasus penangkapan sewenang-wenang dan dua kasus penahanan sewenang-wenang dari total 78 kasus penangkapan politik. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan, kecuali lima orang yang sedang diproses lebih lanjut dan tujuh orang yang tidak diketahui perkembangannya. Setidaknya enam orang menjadi korban penyiksaan atau penganiayaan, dua di antaranya meninggal dunia.

Selama periode ini kami juga mencatat setidaknya ada sembilan kasus dari penangkapan sebelumnya yang telah menerima putusan pengadilan. Satu orang dibebaskan, sementara yang lainnya menerima hukuman mulai dari satu hingga tujuh tahun penjara. Empat orang dihukum atas pelanggaran “mengetahui dan gagal mencegah permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan”, sementara lima orang lainnya dihukum atas berbagai pelanggaran, mulai dari penadahan, pemerasan, dan membahayakan keamanan publik, hingga pembunuhan.

Latar Belakang

Pada bulan Januari, ada usulan dari pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk memberikan pengampunan atau amnesti kepada tahanan politik (tapol) Papua.¹ Beberapa menteri kemudian membuat pernyataan publik bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada tapol Papua yang tidak terlibat dalam perjuangan bersenjata. Lebih lanjut, Menteri Hukum mengidentifikasi 18 tapol Papua untuk menerima amnesti.² Beberapa pengacara dalam jejaring Papuans Behind Bars telah mengkonfirmasi inisiatif ini, baik dari pihak berwenang maupun beberapa tapol. Langkah ini serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo pada 2015 yang

¹ BBC, Prabowo berencana beri amnesti kepada kelompok pro-kemerdekaan Papua - Apa itu amnesti dan apa pengaruhnya bagi penyelesaian konflik di Papua?, 24 Januari 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93qle3639eo>.

² Antara, Prabowo akan beri amnesti napi pengguna narkoba hingga kasus Papua, 13 Desember 2024, tersedia di <https://www.antarane.ws.com/berita/4527820/prabowo-akan-beri-amnesti-napi-pengguna-narkoba-hingga-kasus-papua>.

memberikan grasi kepada lima tapol Papua.³ Namun, hingga akhir Maret, belum ada tindak lanjut dari proposal amnesti baru ini.

Juga pada Januari, pemerintahan Prabowo memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia, termasuk di West Papua, yang telah menjadi bagian dari kebijakan prioritas utamanya selama kampanye pemilihan presiden. MBG memakan biaya sebesar Rp71 triliun (USD 4,358 miliar) di tengah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴

Pada 20 Maret, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan amendemen Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tahun 2004, meskipun mendapat protes massa dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Amendemen tersebut memberikan peran sosial dan politik yang lebih besar bagi militer, di luar peran tradisional mereka di bidang pertahanan. Di bawah UU TNI yang baru, personel militer aktif dapat ditunjuk untuk menduduki 14 jabatan sipil, termasuk beberapa di bidang penegakan hukum. Sayangnya, perubahan pada UU tersebut tidak menindaklanjuti upaya untuk mereformasi sistem peradilan militer, dan hal ini mencegah pengadilan umum untuk mengadili personel militer yang melakukan tindak pidana, sehingga melanggengkan impunitas. Sebuah proposal untuk mengizinkan personel militer memasuki sektor bisnis ditolak karena adanya protes publik yang besar secara nasional.



Gambar 1. Demonstrasi penolakan atas revisi UU TNI di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Yogyakarta. Sumber: Rafael Christopher dan Vanesh De Gabze

³ BBC, Presiden Jokowi beri grasi untuk lima tapol di Papua, 9 Mei 2015, tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi.

⁴ Kementerian Keuangan, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menilik-eksistensi-program-mbg-atau-makan-bergizi-gratis>.

Pada bulan Februari, Global Legal Action Network (GLAN) dan London Mining Network (LMN) mengirimkan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan Inggris (Financial Conduct Authority/FCA) dan London Metal Exchange terkait perdagangan “tembaga kotor” yang diproduksi di Tambang Grasberg, Mimika, West Papua. Limbah tambang Grasberg telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di tanah milik masyarakat adat Papua dan sungai-sungai di sekitarnya. Perdagangan tersebut dapat dianggap sebagai “properti kriminal” di bawah UU Hasil Kejahatan tahun 2002 dan kedua pengadu tersebut menyerukan agar perdagangan tersebut diakhiri.⁵

Pada pertengahan Februari, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa beberapa pemilihan kepala daerah di West Papua harus diulang, termasuk di Provinsi Papua. Mahkamah membatalkan calon wakil gubernur yang menang karena kecurangan administratif. Pada Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengumumkan bahwa pemilihan ulang akan dilaksanakan pada 6 Agustus.⁶ Selama kampanye pemilihan Gubernur Provinsi Papua, terdapat ujaran kebencian dan ujaran-ujaran lain yang menghasut yang menyebabkan adanya ketegangan antaretnis dan antaragama di Papua.⁷



Gambar 2. Kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kab. Tolikara, Prov. Papua Pegunungan, November 2024. Sumber: AIDP

Pada 7 Maret, sembilan Prosedur Khusus PBB di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengirimkan surat bersama kepada Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan mereka tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat Papua yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).⁸ Keprihatinan mereka termasuk tidak adanya

⁵ GLAN & LMN, *GLAN and London Mining Network take action over 'dirty copper' traded on the London Metal Exchange*, tersedia di <https://www.glanlaw.org/dirty-metals>.

⁶ Jubi, KPU tetapkan tanggal pemungutan suara ulang pilgub Papua, kampanye 130 hari, 27 Maret 2025, tersedia pada <https://jubi.id/mamta/2025/kpu-tetapkan-tanggal-pemungutan-suara-ulang-pilgub-papua-kampanye-130-hari/>.

⁷ IPAC, *Potential Fraud and Violence in Papua's Approaching Elections*, 15 November 2024, tersedia di <https://understandingconflict.org/en/publications/IPAC-report-98-Potential-Fraud-and-Violence-in-Papuas-Approaching-Elections>.

⁸ Lihat <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=22>. Sembilan Prosedur Khusus PBB terdiri dari Pelapor Khusus untuk hak atas pangan, Kelompok Kerja untuk masalah hak asasi manusia dan korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya, Pelapor Khusus di bidang hak-hak budaya, Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Pelapor Khusus tentang situasi pembela hak asasi manusia, Kelompok Kerja tentang hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di daerah pedesaan, Pelapor

persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA, FPIC) dari masyarakat adat Papua, Yeinan dan Malind, pemilik tanah yang terkena dampak PSN Merauke. Prosedur Khusus PBB tersebut juga menyampaikan keprihatinan mereka bahwa masyarakat adat Papua tidak hanya akan menghadapi kerusakan lingkungan yang mencakup sekitar dua juta hektar, tetapi juga potensi hilangnya kedaulatan budaya dan spesies endemik yang beragam.

Pada 8 Maret, Gereja Katolik Vatikan menunjuk Pastor Bernardus Baru sebagai Uskup di Keuskupan Timika. Beliau adalah uskup asli Papua kedua setelah Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You dari Keuskupan Jayapura. Pastor Bernardus Baru adalah mantan Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) dari Ordo Santo Agustinus (OSA) di Sorong.

Kasus-Kasus Baru

Terdapat 78 penangkapan baru antara Januari dan Maret 2024. Dalam periode ini kami mendokumentasikan 50 kasus baru yang melibatkan penangkapan sewenang-wenang terhadap anak muda Papua (berusia antara 15 dan 17 tahun). Hampir semuanya adalah pelajar SMA di Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang ditangkap pada 17 Februari lalu karena memprotes Program MBG. Para pelajar SMA di Nabire menamakan koalisi mereka Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP). Para demonstran berkumpul di sebuah pasar lokal di Kota Nabire dan mulai berjalan kaki ke kantor dinas pendidikan setempat untuk menyampaikan keprihatinan mereka karena beberapa media telah melaporkan banyak kasus pelajar yang keracunan akibat MBG dan mereka menuntut agar MBG diubah menjadi program sekolah gratis. Setelah berjalan kurang dari satu kilometer, para pelajar dicegat oleh personel Kepolisian Nabire dan 48 orang dari mereka ditangkap dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Nabire. Polisi mengklaim bahwa aksi tersebut diprovokasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).⁹ Setelah diinterogasi, semua pelajar dibebaskan tanpa dakwaan.



Gambar 3. Puluhan pelajar dikumpulkan di lapangan Polres Nabire, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah, setelah demo penolakan mereka atas program Makan Bergizi Gratis dibubarkan polisi, 17 Februari 2025. Sumber: Jubi/Hengky Yeimo

Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan konsekuensinya, serta Pelapor Khusus tentang hak atas air minum yang aman dan sanitasi.

⁹ Jubi, Unjuk rasa tolak makan bergizi gratis, pelajar di Nabire diangkut ke mapolres, 17 Februari 2025, tersedia di <https://jubi.id/meepago/2025/unjuk-rasa-tolak-makan-bergizi-gratis-pelajar-di-nabire-diangkut-ke-mapolres/>.

Kasus-kasus lain yang melibatkan para pemuda terjadi di Yahukimo, Provinsi Pegunungan Papua. Pada 3 Januari, Polres Yahukimo, termasuk Satuan Brigade Mobil (Brimob), menangkap dua anak di bawah umur berinisial YM (14) dan HS (17) di Kali Bonto, Kabupaten Yahukimo, dalam sebuah operasi patroli dan penyisiran. Polisi melakukan operasi ini setelah terjadi insiden penembakan dua hari sebelumnya, pada 1 Januari. Hingga akhir Maret 2025, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kedua anak di bawah umur tersebut.

Insiden penangkapan massal lainnya dilakukan oleh Kepolisian Resor Jayapura terhadap 12 aktivis Papua dari Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP) pada 18 Maret di Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura. Penangkapan dilakukan ketika para aktivis tersebut membagikan selebaran yang menyerukan boikot terhadap produk dan investasi Indonesia, dan memperkuat dukungan mereka terhadap inisiatif serupa yang akan dilakukan di London dua hari kemudian, 20 Maret, yang juga diorganisir oleh GR-PWP.¹⁰

Pada periode ini, kami mendokumentasikan sembilan kasus penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan kelompok-kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua. Pada 31 Januari, Satgas Damai Cartenz¹¹ menangkap Yantis Murib alias Nosin Murib di Sentani, Kabupaten Jayapura. Penangkapan tersebut dilakukan karena Yantis diduga terlibat dalam penembakan seorang warga sipil di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada tahun 2024.¹² Selanjutnya, ia didakwa melakukan pembunuhan dan kepemilikan senjata api serta senjata tajam berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Darurat.

Pada 3 Februari, personel Satgas Damai Cartenz dilaporkan menangkap seseorang yang dicurigai sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Iyoktogi Telenggen, di Bandara Nop Goliat, Kabupaten Yahukimo. Setelah ditangkap di bandara, ia langsung dibawa ke markas Polres Yahukimo. Polisi menyatakan bahwa Iyoktogi terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan terhadap belasan warga sipil, termasuk 13 penambang emas di Kali El, Seradala, Kabupaten Yahukimo.¹³ Hingga akhir Maret, tidak ada kabar terbaru mengenai Iyoktogi. Pada 19 Februari, beberapa anggota Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Satgas Damai Cartenz menangkap mantan anggota polisi, Aske Mabel, di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Selain karena desersi, Aske ditangkap karena diduga mencuri empat pucuk senjata laras panjang jenis AK dan puluhan amunisi dari Polres Yalimo pada

¹⁰ Lihat <https://westpapuanews.org/kapolres-jayapura-melakukan-penangkapan-ilegal-12-aktivis-gerakan-rakyat-pembebasan-west-papua-di-sentani>.

¹¹ Satgas ini dibentuk pada Januari 2022, menggantikan satgas sebelumnya, Satgas Operasi Nemangkawi, untuk menangani kelompok-kelompok bersenjata prokemerdekaan di West Papua. Satgas Damai Cartenz terdiri dari hampir 2.000 personel polisi dan 101 personel TNI. Satgas ini beroperasi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Mimika, Dogiyai, Jayawijaya, dan Jayapura.

¹² Kompas, Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO KKB di Sentani, Jayapura, 31 Januari 2025, tersedia di: <https://regional.kompas.com/read/2025/01/31/194203078/satgas-damai-cartenz-tangkap-dpo-kkb-di-sentani-jayapura>.

¹³ CNN, Anggota KKB Iyoktogi Ditangkap Terkait Pembunuhan 13 Penambang Emas, 4 Februari 2025, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250204124614-12-1194371/anggota-kkb-iyoktogi-ditangkap-terkait-pembunuhan-13-penambang-emas>.

awal Juni 2024. Polisi juga menyatakan bahwa Aske terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan antara bulan November 2024 dan Januari 2025.¹⁴

Pada 6 Maret, personel Satgas Damai Cartenz menangkap seorang mantan prajurit TNI, Yuni Enumbi alias Yuni Masok, di KM 76, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Yuni diduga menjadi pemasok senjata dan amunisi kepada kelompok prokemerdekaan Papua di Kabupaten Puncak Jaya. Polisi mengklaim telah menyita dua pucuk senapan SS1, empat pucuk pistol, empat magasin SS1, lima magasin pistol, 600 butir amunisi kaliber 5.56mm/5TJ, dan 250 butir amunisi kaliber 9mm. Selain itu, polisi juga menyita tas, kartu ATM, dan uang senilai Rp369,9 juta (USD 22.763).¹⁵ Selain Yuni Enumbi, polisi mengklaim telah menangkap sejumlah orang lainnya baik dari kalangan sipil maupun militer aktif di Jawa yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Perkembangan Kasus

Kami mencatat perkembangan proses hukum yang berakhir dengan vonis terhadap sembilan tahanan Papua. Pada bulan Maret, tiga kasus melibatkan Arkelaus Lokon yang diadili dengan dakwaan yang sama, pembakaran (Pasal 187(1) KUHP), telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Para hakim dari majelis yang berbeda di PN Jayapura semuanya memvonis Lokon bersalah karena membakar sejumlah bangunan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura antara bulan September dan November 2023. Ia dijatuhi hukuman antara tiga hingga empat tahun penjara.



Gambar 4. Petrus Madai setelah menjalani persidangan di PN Nabire, 23 Januari 2025. Sumber: Jubi/Hengky Yeimo

Pada 3 Maret, majelis hakim menerima keberatan terdakwa Petrus Madai dan pengacaranya kemudian membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Madai didakwa atas kepemilikan senjata tajam berdasarkan UU Darurat. Pada 4 Maret, jaksa mendaftarkan

¹⁴ Jubi, Desertir polisi Aske Mabel ditangkap tim gabungan di Yalimo, 19 Februari 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2025/desertir-polisi-aske-mabel-ditangkap-tim-gabungan-di-yalimo/>.

¹⁵ Jubi, Satgas Damai Cartenz tangkap mantan prajurit TNI, sita senjata dan uang Rp 369,6 juta, 8 Maret 2025, tersedia di <https://jubi.id/mamta/2025/satgas-damai-cartenz-tangkap-mantan-prajurit-tni-sita-senjata-dan-uang-rp3696-juta/>

ulang perkara yang sama. Petrus Madai ditangkap oleh Polres Nabire pada 15 Agustus 2024 saat terjadi demonstrasi di sejumlah tempat di kota Nabire yang diorganisasi oleh para aktivis KNPB untuk memperingati Perjanjian New York 1962.¹⁶

Perkembangan kasus penting pada periode ini adalah terkait pembakaran sekolah dan kantor Distrik Kramongmongga serta pembunuhan kepala distriknya pada 15 Agustus 2023. Sehari setelah kejadian, operasi keamanan gabungan diluncurkan untuk memburu para pelaku. Dalam penggerebekan berikutnya, Agustus dan September 2023, aparat kepolisian menembak mati lima orang karena dianggap melawan saat ditangkap. Para saksi mata setempat menyatakan bahwa alih-alih melepaskan tembakan peringatan, para petugas langsung menembak para korban.¹⁷ Polisi juga menangkap 12 warga kampung dan kemudian mendakwa tujuh orang di antaranya, sementara sisanya dibebaskan setelah diinterogasi.¹⁸ Pada Juni 2024, jaksa mendakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Ferdinandus Kramandondo, Hariyanto Iba, Vridolin Petrus Yoris Kramandondo, dan Yohanes Kramandondo, dengan tuduhan pembunuhan berencana dan pembakaran dan menuntut mereka dijatuhi hukuman seumur hidup.

Pada 1 Agustus 2024, hakim PN Fakfak menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Ferdinandus Kramandondo berdasarkan Pasal 187 KUHP tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, dan para terdakwa lainnya dijatuhi hukuman antara 14 hingga 15 bulan penjara karena melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum, Pasal 164 jo. 108 KUHP. Jaksa kemudian mengajukan banding atas semua putusan PN Fakfak. Pada 7 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi Manokwari menguatkan putusan sebelumnya untuk Ferdinandus Kramandondo, dan menambah hukuman untuk terpidana lainnya menjadi 18 bulan penjara. Jaksa kembali mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Manokwari. Akhirnya, antara Januari dan Februari 2025, Mahkamah Agung menguatkan semua putusan Pengadilan Tinggi Manokwari dan menolak kasasi jaksa.¹⁹

Pada 14 Januari 2024, majelis hakim PN Nabire menyatakan Anan Nawipa bersalah atas pembunuhan berencana dan pencurian, dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan 10 tahun dari tuntutan jaksa. Nawipa ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada 11 Mei 2024 di Kampung Bapauda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Ia diduga terlibat dalam pembunuhan Danramil Aradide pada 11 April 2024 di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai. Nawipa diduga berada di tempat kejadian dan membawa telepon

¹⁶ Lihat Papuans Behind Bars Q3 (Juli-September) 2024, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q3-2024/>.

¹⁷ Human Rights Monitor, *Joint security forces kill five indigenous Papuans in Fakfak – Human rights organisations demand independent investigation*, 21 September 2023, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/news/joint-security-forces-kill-five-indigenous-papuans-in-fakfak-human-rights-organisations-demand-independent-investigation/>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Lihat berbagai keputusan Pengadilan tentang Kasus Kramongmongga 2023, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=2db7b631-b2f7-429e-82ba-9f29392bd1cc, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7b963bd7-4f4b-4d72-aa8c-a2f58cd0ae40, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=95d5b70d-18d5-4076-8671-de581dd89f33, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=23632017-d698-4f3d-9670-4b26f0327a7e, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef8489921a8a6a8608313535333036.html>.

genggam korban. Baik jaksa maupun terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada 10 Maret 2025, Pengadilan Tinggi Jayapura memutus dengan menguatkan putusan PN Nabire, tetapi jaksa kembali mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Selama periode ini, kami mendokumentasikan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap tahanan politik Papua, seperti kematian dalam tahanan dan penyiksaan atau penganiayaan lainnya.



Gambar 5. Jenazah Goliath Sani di RSUD Yokatapa, Kab. Intan Jaya, 28 Februari 2025.
Sumber: Istimewa

Pada 27 Februari, aparat militer dilaporkan menangkap dua orang Papua, Goliath Sani dan seorang temannya (namanya tidak diketahui), di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Sementara temannya dibebaskan tak lama setelah penangkapan, Sani ditahan hingga keesokan harinya. Keluarga meyakini bahwa Sani disiksa hingga tewas selama penahanan. Keesokan harinya, sejumlah personel TNI terlihat mengantarkan jenazah Sani ke Rumah Sakit Yokatapa di Sugapa. Sejak Oktober 2024 telah terjadi bentrokan bersenjata antara pasukan militer Indonesia (TNI) dan kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua (TPNPB) di Distrik Sugapa.²⁰

²⁰ Human Rights Monitor, *Military members alleged of executing Papuan civilian in Mamba Village, Intan Jaya*, 3 Maret 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/military-again-alleged-of-executing-papuan-civilian-in-mamba-village-intan-jaya/>.

Pada 22 Maret, anggota militer secara sewenang-wenang menangkap Abral Wandikbo di rumahnya di Kampung Yuguru ketika ia sedang merawat ayahnya yang sakit. Wandikbo, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, diinterogasi di bawah todongan senjata dan diborgol. Dia dipaksa untuk memberikan informasi tentang tempat persembunyian TPNPB. Dibawa ke Lapangan Terbang Yuguru, dia menolak memberikan informasi tersebut dan disiksa. Mayatnya dibuang dan ditemukan tiga hari kemudian di dekat area berkebun, 200 meter dari pos militer. Abral Wandikbo adalah penduduk asli Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga.

Pada tanggal 13 Maret, personel militer dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap, menahan dan menyiksa EW bersama dengan dua orang masyarakat adat Papua lainnya, PW dan LA (nama dirahasiakan karena alasan keamanan), di Kabupaten Puncak Jaya selama lebih dari dua jam di pangkalan militer Kodim 1714. Personel militer Indonesia secara kolektif melakukan pemukulan selama pengangkutan dan penahanan di pangkalan. Mereka berulang kali menuduh para korban terlibat dalam pembunuhan seorang rekan mereka selama konflik pemilu di kabupaten tersebut. Komandan kemudian meminta maaf dan menawarkan kompensasi sebesar Rp300.000 (USD 18,5), setelah itu mereka dibebaskan dan dikembalikan ke rumah mereka tanpa menerima bantuan medis.



*Gambar 6. Warga setempat membawa jenazah Abral Wandikbo yang ditemukan berada di sebuah kebun dekat sungai, 23 Maret 2025, setelah ditangkap personel militer sehari sebelumnya.
Sumber: Istimewa*

Papuans Behind Bars bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta LSM yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di info@papuansbehindbars.org

Kunjungi papuansbehindbars.org untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

